

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Nasional di kuartal I 2019 berada di angka 5,07% (BPS, 2019), angka ini berada di bawah prediksi Pemerintah, Bank Sentral maupun pasar. Kondisi ini kontras dengan ekonomi Amerika Serikat yang tumbuh lebih tinggi daripada konsensus pasar. Struktur ekonomi Indonesia triwulan I masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan diikuti perdagangan besar-eceran reparasi mobil-sepeda motor, pertanian kehutanan perikanan dan konstruksi. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,68 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 diasumsikan di antara 5,3 persen hingga 5,6 persen yang didukung oleh perbaikan kinerja investasi dan ekspor. Sedangkan di akhir 2019 ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,3% sesuai target di APBN 2019, artinya laju ekonomi naik dibandingkan pencapaian tahun 2018 yang hanya 5,17%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tercapai dengan asumsi perekonomian global terus membaik, tidak ada krisis ekonomi dunia, peningkatan kebijakan pemerintah terkait peningkatan perekonomian kesejahteraan masyarakat.

Sementara untuk inflasi di tahun 2020 diperkirakan masih di kisaran 2 hingga 4 persen, dengan asumsi terjadi stabilitas harga dan tidak ada kenaikan terkait harga BBM, listrik dan gas.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai upaya-upaya perluasan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, membuka lapangan kerja produktif, peningkatan kualitas produk, memperkuat pengembangan produk lokal, diharapkan akan menurunkan angka kemiskinan nasional sebesar 8,5%-9,5% (target RKP 2019).

Hal ini sejalan dengan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 di mana salah satu sasarannya adalah meningkatkan produktivitas untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan kemandirian daerah dengan tujuan meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumber daya yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan dan membangun budaya berdikari.

Secara umum arah kebijakan ekonomi Kabupaten Wonosobo adalah penguatan sektor basis yaitu pertanian yang didukung oleh sektor lainnya dengan prioritas :

1. Pemanfaatan teknologi dan inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan, nilai tambah produk pertanian, produktifitas, kuantitas dan kualitas untuk mewujudkan kemandirian serta swasembada pangan.
2. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas usaha/industri kecil dan menengah melalui peningkatan SDM, peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk, standarisasi dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, peningkatan akses modal, pemasaran, kemitraan dan penguatan kelembagaan.

3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan penguatan kelembagaan sektor finansial untuk memenuhi kebutuhan modal bagi masyarakat UMKM dan rumah tangga miskin desil 3 dan 4.
4. Pengembangan pariwisata yang berbasis *agro-eco-culture tourism* yang didukung ekonomi kreatif melalui pengembangan atraksi, amenities dan aksesibilitas wisata serta peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku wisata.
5. Perbaikan iklim investasi yang kondusif dan inovatif dengan kemudahan perijinan dan pengembangan jaringan pemasaran untuk meningkatkan daya saing, sejalan dengan *branding* “Wonosobo the Soul of Java”.
6. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan penguatan program *link and match*.

3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019

Berdasarkan asumsi perkembangan ekonomi tahun 2017-2020 apabila berjalan sesuai dengan kondisi riil daerah, maka tantangan pembangunan ekonomi daerah tahun 2020 diperkirakan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2018 perekonomian Kabupaten Wonosobo tumbuh sebesar 4,14 persen, di mana peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 30,27 persen, diikuti industri pengolahan sebesar 17,15 persen dan perdagangan sebesar 17,04 persen. Meningkatnya peranan sektor-sektor ini diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat secara luas.
2. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (2018 : 17,58%), merupakan permasalahan tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan yang diakibatkan oleh keterbatasan mengakses sumber daya produksi yang tersedia, maupun keterbatasan infrastruktur, diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin. Selain itu perlu membuka wilayah tertinggal melalui pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan jasa.
3. Masih banyaknya penduduk usia kerja yang masih mencari pekerjaan mengindikasikan bahwa perekonomian daerah belum optimal mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun. Selain itu produk sumberdaya manusia yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja. Rendahnya status pekerjaan sebagai usaha mandiri (wirausaha), memerlukan dorongan dan motivasi agar usaha mandiri dapat lebih berkembang dan menjadi alternatif bagi para tenaga kerja. Hal ini akan tercapai melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja serta penyediaan usaha dengan persyaratan yang murah dan sederhana.
4. Isu alih fungsi lahan tanaman pangan, kerusakan lahan akibat penggunaan bahan berbahaya (pupuk dan pestisida), ketersediaan akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi, munculnya hama dan penyakit tanaman, gejolak harga kebutuhan pokok, mutu dan keamanan pangan serta terbukanya

arus pasar global akan mempengaruhi daya saing produk-produk pertanian Kabupaten Wonosobo.

5. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal terutama untuk sektor pertanian dan pariwisata serta makin berkurangnya fungsi lingkungan hidup dan menurunnya fungsi hutan akan membawa dampak pada perkembangan ekonomi daerah.
6. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah masih dirasakan belum optimal yang akan berdampak pada berkurangnya minat investor untuk berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Wonosobo.

Memperhatikan kondisi ekonomi makro tahun yang lalu dan perkembangan saat ini, kondisi perekonomian tahun 2019 dan 2020 diperkirakan ada sedikit peningkatan karena Kabupaten Wonosobo memiliki beberapa prospek ekonomi yang masih bisa diandalkan, antara lain :

1. Karakteristik perekonomian sebagian besar didominasi oleh sektor pertanian dan kehutanan yaitu komoditi sayuran, buah-buahan, ikan air tawar dan hasil hutan berupa kayu.
2. Pergeseran peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan trend positif yang bisa memacu perolehan nilai tambah produksi bagi masyarakat lokal sehingga pertumbuhan PDRB akan semakin terpacu.
3. Sektor UMKM dan koperasi cukup berperan dalam berbagai bidang usaha yang bisa menjadi alternatif lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.
4. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, air bersih telah mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar dan sebaran distribusi barang-barang konsumsi masyarakat menjadi lebih efisien sehingga akan menahan laju inflasi.
5. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masih dibutuhkan investasi baru untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi yang memerlukan teknologi sederhana dengan modal yang tidak begitu besar diharapkan bisa ditangani oleh UMKM terutama usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan dan perdesaan.
6. Pengembangan pasar dengan meningkatkan daya saing daerah melalui produk unggulan yang mampu bersaing di pasar lokal, regional, nasional maupun internasional.
7. Menciptakan pengungkit pertumbuhan ekonomi terutama pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh serta wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota tetangga.

Di samping itu asumsi-asumsi yang menjadi pertimbangan dalam memperkirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2020 adalah :

1. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional maka pertumbuhan ekonomi daerah akan ikut tumbuh, apabila pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 diprediksi 5,3%-5,6%, Provinsi Jawa Tengah 5,5%, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo diharapkan tumbuh sebesar 6,3% dan pertumbuhan PAD diprediksi meningkat sebesar 2,11%.

2. Porsi belanja langsung APBD dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan sharing pembiayaan dengan pemerintah pusat dan provinsi.
3. Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah berjalan lancar sesuai perencanaan
4. Perekonomian nasional dan daerah tidak terganggu oleh situasi politik dan keamanan yang kurang kondusif.
5. Tidak terjadi bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat, dan apabila terjadi masih dalam batas normal yang dapat dikendalikan dampaknya.
6. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diperkirakan akan meningkat pada kisaran 2,94% yang diharapkan semakin merata dan investasi juga mulai tumbuh sekitar 2,2 trilyun yang didukung oleh situasi yang semakin kondusif meskipun diperkirakan inflasi sekitar 3,09%.
7. Tingkat kemiskinan tahun 2020 diprediksi sebesar 13,10% sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh.
8. Pada tahun 2020 juga diharapkan akan semakin meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka diharapkan akan semakin menurun menjadi 4,70%.

Proyeksi indikator ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2020 selengkapnya tertera pada tabel berikut.

Tabel

Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 dan 2020

No	Indikator	Target	
		RKPD 2019	RKPD 2020
1.	PDRB : Atas Dasar Harga Berlaku (Trilyun Rp) Atas Dasar Harga Konstan (Trilyun Rp)	17,76 12,93	18,63 13,32
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,12	6,30
3.	Inflasi (%)	3,17	3,09
4.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	18,20	19,25
5.	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Trilyun Rp)	2,00	2,20
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,76	4,70
7.	Kemiskinan (%)	14,76	13,10

Sumber : RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021

Sejalan dengan target sasaran pembangunan ekonomi Nasional dan Provinsi, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 ditujukan dalam rangka penguatan sektor basis yaitu pertanian yang didukung oleh sektor lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan ekonomi diprioritaskan pada upaya pencapaian daya saing ekonomi melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi, peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas usaha/industri kecil dan

menengah, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan sektor finansial, pengembangan pariwisata, perbaikan iklim investasi serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, optimalisasi dana perimbangan serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Selama kurun waktu Tahun 2016 – 2019, sumber pendapatan yang menempati porsi terbesar dengan rata-rata kontribusi terhadap pendapatan daerah adalah dana perimbangan yaitu sebesar 65,26 persen diikuti dan Lain – Lain Pendapatan yang Sah 21,89 persen dan PAD sebesar 12,85 persen.

Tahun 2020 pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo diproyeksikan sebesar Rp. 1,906 Trilyun yang bersumber dari PAD sebesar Rp.215,47 Milyar, Dana Perimbangan sebesar Rp.1,257 Trilyun dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 433,66 Milyar. Realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tabel berikut:

Tabel

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah (Milyar Rp.)				
		2016	2017	2018*)	2019**)	2020***)
1	PAD	199,894,767,510	291,469,507,166	212,079,482,339	211,013,295,214	215,472,395,2
1.1.	Pajak Daerah	30,274,645,410	32,421,500,000	36,176,600,000	37,093,500,000	38,819,700,0
1.2.	Retribusi Daerah	11,013,605,521	9,901,714,220	8,770,187,565	8,947,290,000	9,930,190,0
1.3.	Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	12,070,308,915	25,451,690,000	15,367,071,000	16,917,801,994	16,917,801,9
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	146,536,207,664	223,694,602,946	151,765,623,774	148,054,703,220	149,804,703,2
2	Dana Perimbangan	1,079,170,500,015	1,157,965,665,000	1,151,068,465,000	1,257,465,460,000	1,257,465,460,0
2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	25,946,175,664	39,411,171,000	38,589,241,000	33,952,458,000	33,952,458,0
2.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	12,843,147,351				
2.3.	Dana Alokasi Umum	841,407,175,000	826,626,357,000	827,791,657,000	872,853,362,000	872,953,362,0
2.4.	Dana Alokasi Khusus	198,974,002,000	291,928,137,000	284,687,567,000	350,559,640,000	350,559,640,0
3	Lain-lain Pendapatan	296,536,566,155	393,873,037,419	449,280,992,000	418,762,511,000	433,659,880,0

yang Sah					
Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	1,575,601,833,680	1,843,308,209,585	1,812,428,939,339	1,887,241,266,214	1,906,597,735,2

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo, BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2019

Keterangan : *) Realisasi APBD TA 2018 Unaudited

**) APBD Tahun 2019

***) Proyeksi tahun 2020

Tabel

Persentase Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2019 dan Proyeksi 2020

No	Uraian	2016	2017	2018*)	2019**)	2020***)
1	Pendapatan Asli Daerah	12.69	15.81	11.70	11.18	11.30
2	Dana Perimbangan	68.49	62.82	63.51	66.63	65.95
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	18.82	21.37	24.79	22.19	22.75
	Jumlah Pendapatan Daerah (1+2+3)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo antara lain :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan peningkatan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan baru.
2. Mengoptimalkan pemungutan retribusi serta peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetorannya.
3. Membangun sistem administrasi pajak dan retribusi berbasis online.
4. Pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan.
5. Pengelolaan BUMD secara profesional sehingga bisa berdaya saing dan bisa meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL).

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa serta modal.

Belanja Daerah tahun 2020 menggunakan prinsip *money follow programme* yaitu dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun

Tahun 2020 Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo diproyeksikan sebesar Rp. 1,96 Trilyun yang terdiri dari 1,19 Trilyun Belanja Tidak Langsung dan 772,53 Milyar Belanja Langsung. Akan terjadi penurunan untuk belanja langsung sebesar 16,09%, sedangkan untuk belanja tidak langsung meningkat sebesar 7,69%. Berdasarkan perkiraan APBD tahun 2020, sebagian besar belanja tidak langsung yaitu 9,59% masih dialokasikan untuk belanja pegawai. Total belanja akan mengalami penurunan, dengan pertumbuhan yang akan dicapai sebesar 3,10%.

Realisasi dan proyeksi Belanja daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana tabel berikut.

Tabel
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo

No	Uraian	Realisasi			2019**)	2020
		2016	2017	2018		
1	Belanja Tidak Langsung	1,005,524,738,867	1,099,113,733,973	1,072,153,744,966	1,107,535,703,702	1,192,6
1.1.	Belanja Pegawai	745,596,498,059	787,029,157,973	761,947,256,966	751,600,752,773	780,8
1.2.	Belanja Bunga					
1.3.	Belanja Hibah	8,728,200,000	14,609,600,000	16,572,600,000	22,866,300,000	74,8
1.4.	Belanja Bantuan Sosial	73,000,000	5,000,000,000	7,560,500,000	13,911,400,000	13,8
1.5.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	4,096,273,050	4,235,150,000	5,107,990,000	3,709,350,000	3,8
1.6.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah				914,404,929	9
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, Pemds, Prov lain & Parpol	239,582,160,300	283,239,826,000	275,965,398,000	309,533,496,000	313,1
1.8.	Belanja Tidak Terduga	7,448,607,458	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,0
2	Belanja Langsung	613,615,381,593	901,499,970,788	1,000,239,760,769	920,672,917,778	772,5
Total Jumlah Belanja (1+2)		1,619,140,120,460	2,000,613,704,761	2,072,393,505,735	2,028,208,621,480	1,965,2

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo dan BPPKAD Kabupaten Wonosoo, 2019

Keterangan : *) Realisasi APBD Unaudited

**) APBD Murni TA 2019

***) Proyeksi tahun 2020

Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan berdasarkan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dengan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran belanja daerah yang lebih efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran yang relatif kecil jika dibandingkan permasalahan daerah yang harus diatasi.
2. Memprioritaskan belanja sesuai prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan dalam rangka penanganan permasalahan dan isu-isu strategis daerah serta peningkatan indikator kinerja utama daerah;
3. Sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019, RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005-2025, Sustainable Development Goals (SDGs).
4. Memenuhi alokasi prosentasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai peraturan yang berlaku.
5. Mengakomodir program pembangunan yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat dalam forum koordinasi di bidang perencanaan.
6. Mengalokasikan belanja bantuan sosial maupun hibah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika perkiraan belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah, maka akan menyebabkan terjadinya transaksi keuangan yang defisit dan sebaliknya akan terjadi surplus.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah terjadi karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terjadi defisit. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA). Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten. Selama periode 2016-2019 APBD Kabupaten Wonosobo mengalami defisit yang ditutup dari penerimaan pembiayaan daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Wonosobo dari sisi penerimaan pembiayaan pada tahun 2020 diarahkan untuk penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2019 dan pencairan dana cadangan sebagai sumber penerimaan APBD tahun 2020.

Sedangkan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020, diarahkan untuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada BUMD dalam rangka perbaikan kinerja BUMD.

Tabel
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan daerah Kabupaten Wonosobo

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah (Rp. 000,-)			
		2016	2017	2018*)	2019**)
1	Penerimaan Pembiayaan	238,009,495,126	178,535,995,176	271,464,566,396	175,473,355,266
1.1.	SiLPA	238,009,495,126	178,535,995,176	271,464,566,396	175,473,355,266
1.2.	Pencairan Dana Cadangan		0		-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan				
2	Pegeluaran Pembiayaan	16,030,590,000	21,230,500,000	11,500,000,000	34,506,000,000
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan				20,000,000,000
2.2.	Penyertaan Modal (Investasi)	16,030,590,000	21,230,500,000	11,500,000,000	14,506,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	16,030,590,000	21,230,500,000	11,500,000,000	34,506,000,000
Jumlah Pembiayaan Netto		221,978,905,126	157,305,495,176	259,964,566,396	140,967,355,266

Sumber : Bappeda Kabupaten Wonosobo dan BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2019

Keterangan : *) Realisasi APBD Unaudited

**) APBD Murni TA 2019

**) Proyeksi tahun 2020